



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 7 (Tujuh)
Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Hari, Tanggal	: Senin, 2 September 2024
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si./Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I It 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	: Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025 (Pagu Anggaran);2. Pembahasan pelaksanaan anggaran TA 2023 s.d triwulan II TA 2024; dan3. Lain-lain.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 17 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, <i>Bpk. Kukuh S. Achmad</i>;3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <i>M. Fanshurullah Asa</i>;4. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, <i>Bpk. Purwiyanto</i>;5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, <i>Bpk. Iskandar Zulkarnaen</i> Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) beserta jajarannya pada Pukul 14.31 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 2 September 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar 69,1% dari pagu anggaran tahun 2024.
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar 75,28% dari pagu anggaran tahun 2024.
 - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar 39,82% dari pagu anggaran tahun 2024.
 - d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar 35,98% dari pagu anggaran tahun 2024.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk meningkatkan Realisasi Anggaran Tahun 2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

2. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 di mana ditetapkan pagu anggaran tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. **Badan Standardisasi Nasional (BSN)** sebesar Rp.223.867.121.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp158.451.613.000,- (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
 - 2) Program Standardisasi Nasional sebesar Rp65.415.508.000,- (*Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- b. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** sebesar Rp.105.373.198.000,- (*Seratus Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
- 1) Program Pengawasan Persaingan Usaha Sebesar Rp.23.695.637.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - 2) Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp.81.677.561.000,- (*Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- c. **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)** sebesar Rp.1.992.728.199.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
- 1) Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp.906.514.280.000,- (*Sembilan Ratus Enam Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) Program Pengembangan Kawasan Strategis Sebesar Rp.1.086.213.919.000,- (*Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
- d. **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)** sebesar Rp.53.494.482.000,- (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri dari;
- 1) Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.15.813.191.000,- (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - 2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.37.681.291.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp.65.000.000.000,- (*Enam Puluh Lima Miliar Rupiah*) yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program standardisasi nasional.
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp.419.766.081.000,- (*Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk mencapai target capaian KPPU.
 - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar Rp.89.450.000.000,- (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang digunakan untuk Program Pengembangan Strategis Nasional.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 17.05 WIB.

**KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Ttd.

KUKUH S. ACHMAD

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**

**KETUA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Ttd.

M. FANSHURULLAH ASA

**WAKIL KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM**

Ttd.

PURWIYANTO

**KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAEN